

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah sakit adalah ujung tombak pembangunan kesehatan masyarakat. Namun, tidak sedikit keluhan yang diarahkan pada kualitas pelayanan rumah sakit yang dinilai masih rendah, terutama pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Penyebabnya klasik, yaitu masalah keterbatasan dana sehingga RSUD tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia yang rendah. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU).

Berdasarkan pasal 2 PP No. 23 Tahun 2005, “Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pasal 1 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah yang pada pembahasan selanjutnya disingkat menjadi BLUD adalah:

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Salah satu penyebab munculnya BLUD ini karena adanya pandangan bahwa instansi pemerintah khususnya RSUD, sebagai penyedia layanan masyarakat selama ini tidak diberikan keleluasaan dalam melakukan pengelolaan keuangan. Seluruh pendapatan RSUD harus disetorkan terlebih dahulu ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), baru kemudian RSUD mengajukan rencana anggaran untuk dapat mencairkan dana tersebut. Sehingga terdapat asumsi yang mengatakan bahwa ada banyak potensi pemasukan yang seharusnya dapat langsung digunakan untuk pengelolaan RSUD tidak dapat dimaksimalkan.

Sebelum adanya peraturan mengenai Badan Layanan Umum, manajemen pengelolaan keuangan di sebuah rumah sakit sangat ketat. Rumah sakit tidak diperbolehkan melakukan pinjaman uang ke pihak ketiga, namun rumah sakit dituntut untuk tidak berhenti melakukan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Akibatnya rumah sakit tidak bisa mengembangkan diri dalam hal keuangan dalam rangka pemenuhan peralatan medis. Tidak hanya itu, masalah penggajian pegawai yang tidak proposional yang seharusnya semua pegawai mendapatkan gaji yang sama tanpa membedakan oleh prestasi.

Pada PP No. 23 Tahun 2005 Bab V mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dijelaskan bahwa Badan Layanan Umum memiliki keleluasaan yang lebih dalam mengelola keuangan antara lain berupa: pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, pengelolaan piutang dan utang,

investasi, pengelolaan barang, penyusunan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan, pengelolaan sisa kas di akhir tahun anggaran (surplus dan defisit), kerjasama dengan pihak lain, pengelolaan dana secara langsung, serta perumusan standar, kebijakan sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan.

Penerapan teori agensifikasi merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah yang disediakan oleh pemerintah agar RSUD memiliki fleksibilitas pengelolaan sumber daya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan produktivitas, sebagaimana tertuang dalam Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pelaporan keuangan BLUD disesuaikan dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia. Namun sebagaimana yang kita ketahui di dalam Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) belum ada yang mengatur secara spesifik mengenai pelaporan keuangan rumah sakit, khususnya BLUD. Akan tetapi jika dilihat dari karakteristik BLUD yakni tidak mencari keuntungan (nirlaba), maka PSAK yang sesuai adalah PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba karena rumah sakit yang berstatus BLUD merupakan salah satu contoh organisasi nirlaba yaitu organisasi yang dalam kegiatannya tidak mengejar keuntungan sebagaimana tujuan dibentuknya BLUD.

Akan tetapi, mengingat rumah sakit yang berstatus BLUD merupakan instansi yang berada di lingkungan pemerintah dan bukan entitas yang seharusnya

menggunakan SAK, maka penyusunan laporan keuangannya seharusnya menggunakan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Oleh karena itu, berdasarkan PP No. 23 Tahun 2005 pada pasal 25, 26, dan 27 tentang Akuntabilitas, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Layanan Umum, maka perlu menetapkan suatu pedoman akuntansi Badan Layanan Umum sebagai pedoman pengembangan sistem akuntansi di bidang industri spesifik dan/atau pedoman pengembangan sistem akuntansi Badan Layanan Umum. Untuk keperluan tersebut, maka Menteri Keuangan menerbitkan peraturan yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun laporan keuangan Badan Layanan Umum yaitu Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan keuangan Badan Layanan Umum.

RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang adalah salah satu instansi di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Sintang yang telah ditetapkan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) secara penuh sesuai dengan Keputusan Bupati Sintang No. 1515 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sebagai unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang wajib memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas, sesuai dengan Permendagri No. 61 Tahun 2007

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Permenkeu No. 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengelolaan dan pelaporan keuangan yang dilakukan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul “**Evaluasi Penerapan Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang**”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan tersebut maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Bagaimanakah pengelolaan dan pelaporan keuangan RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 dan Permenkeu No. 76/PMK.05/2008?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui penerapan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang telah dilakukan oleh RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 dan Permenkeu No. 76/PMK.05/2008 terhadap kinerja

pelayanan rumah sakit kepada masyarakat, khususnya untuk mengetahui tingkat kesehatan keuangan rumah sakit.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan yang berguna bagi penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis di bangku kuliah serta memberikan wawasan mengenai penyusunan laporan keuangan pada BLUD.

2. Bagi pihak lainnya

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada pihak yang memerlukan dan sebagai bahan pembelajaran bagi kaum akademisi mengenai laporan keuangan BLUD khususnya RSUD.

3. Bagi RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat dan sarana bagi Pimpinan/Pengelola RSUD Ade Muhammad Djoen Sintang untuk meningkatkan kinerja organisasi, khususnya dalam penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) serta meningkatkan peran dan fungsi Dewan Pengawas dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja BLUD.